

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjustifikasi bahwa penelitian yang diajukan itu penting serta bertujuan juga untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diajukan (Creswell, 2013). Menurut Marshall dan Rossman dalam Creswell (2013) tinjauan pustaka ialah cara untuk merancang penelitian dalam konteks penelitian-penelitian lain yang berhubungan. Sedangkan tinjauan pustaka dilakukan untuk memahami dan mereview penelitian sebelumnya dengan topik atau tema yang sama. Terdapat penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

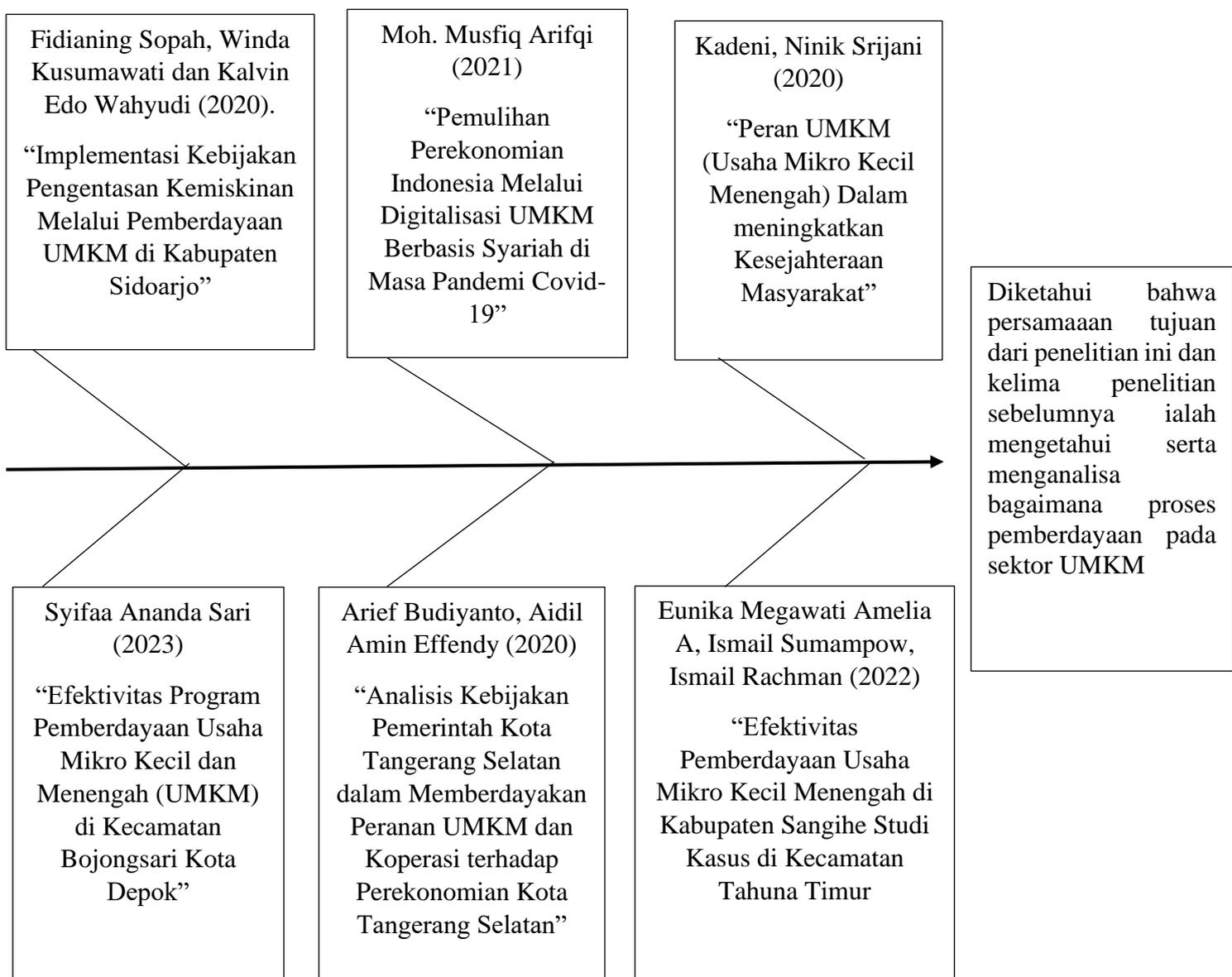
No	Judul	Metode	Hasil
1.	Fidianing Sopah, Winda Kusumawati dan Calvin Edo Wahyudi (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo	Penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif	Dari penelitian ini bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan UMKM sebagai sarana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih dibawah standar.
Perbedaan: Penelitian ini menganalisis tentang implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dengan menggunakan Grindle, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini ialah bagaimana efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok.			
2.	Moh. Musfiq Arifqi (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif	Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa salah satu strategi yang digunakan untuk menghidupkan perekonomian Indonesia di masa wabah Covid-19 adalah digitalisasi UMKM syariah. Upaya digitalisasi UMKM Syariah menghadirkan potensi sekaligus kesulitan. Karena kesempatan ini, akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan ini dalam hal

			manufaktur, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan kesulitannya adalah tidak cukup banyak orang yang memiliki akses ke teknologi.
Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada menjadikan digitalisasi UMKM menjadi peluang bagi pemulihan ekonomi setelah pandemi, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini ialah bagaimana efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok.			
3.	Kadeni, Ninik Sriyani (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penelitian menggunakan metode Kualitatif (Studi Pustaka)	Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah masyarakat mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian. Peran UMKM bagi masyarakat ialah menjadi sarana untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan tingkat perekonomian dan menjadi pemasukan devisa negara.
Perbedaan: Penelitian ini meneliti tentang peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini ialah bagaimana efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok.			
4.	Arief Budiyanto, Aidil Amin Effendy (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan	Penelitian menggunakan metode Kualitatif	Dengan memiliki total 33.596 kategori klasifikasi UKM yang berbeda dari 7 kecamatan Kota Tangerang Selatan. Sektor perekonomian sangat terpengaruh oleh hal ini. Sedangkan pada koperasi, peningkatan unsur operasional ditunjukkan dengan peningkatan jumlah usaha koperasi. Sementara itu, kenaikan SHU (Sisa Hasil Usaha) akan membantu anggota koperasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Perbedaan: Berfokus dengan analisis kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam mencapai kesejahteraan di Kota Tangerang Selatan, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini ialah bagaimana efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok.			
5.	Eunika Megawati Amelia A, Ismail Sumampow, Ismail Rachman (2022). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sangihe Studi Kasus di Kecamatan Tahuna Timur	Penelitian menggunakan metode Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat indikator, ada beberapa masalah pada indikator ketepatan sasaran. Target sasaran yang diproyeksikan pemerintah adalah para pengusaha UMKM yang terdampak pandemi, tetapi pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya tepat sasaran.

Perbedaan: Penelitian ini meneliti tentang efektivitas pemberdayaan UMKM di daerah Kecamatan Tahuna Timur menggunakan teori efektivitas oleh Makmur, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan ini ialah bagaimana efektivitas program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok.

Berikut merupakan diagram *fishbone* yang mencakup penelitian terdahulu dan tujuan dari penelitian ini dengan harapan lebih mudah dipahami serta mengetahui tujuan dari penelitian ini.

Gambar 2. 1 Fish Bone Diagram



Sumber: Peneliti, 2023

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Efektivitas

2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Berasal dari kata bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif yang menjadi kata dasar efektivitas dapat diartikan sebagai “ada efeknya” atau “membawa hasil”. Dalam lingkungan organisasi publik, kata atau istilah Efektivitas dipakai untuk mendefinisikan tepat atau tidaknya sasaran yang dipilih sebuah organisasi. Tidak jarang juga efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan yang didapat oleh organisasi publik terkait rencana-rencana program (Kadarisman, 2019). Istilah efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan kerja yang dilakukan seseorang maupun organisasi demi mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya (Nurul Najidah, 2013). Sedangkan menurut Effendy yang dikutip dalam Kadarisman (2019) menyatakan bahwa efektivitas ialah komunikasi dimana pada proses yang sudah direncanakan sesuai dengan anggaran biaya, waktu dan jumlah personel yang sudah ditentukan.

Disampaikan oleh Ahmad Subekti dalam Utami dan Frinaldi (2021), efektivitas juga dapat diartikan sebagai interaksi antara output dan tujuan. Atau bisa diartikan bahwa efektivitas adalah pengukuran terhadap sejauh apa tingkat menurut output, kebijakan dan sebuah proses menurut suatu organisasi supaya mampu mencapai tujuan yang di harapkan. Berikutnya menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah ruang lingkup upaya yang dilakukan oleh program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan dan sasarannya tetapi tanpa mengorbankan sarana dan prasarana tersebut. Serta tidak memberikan tekanan yang tidak semestinya pada saat pelaksanaan (Maleke et al., 2022). Steers juga menyatakan dalam Sutrisno (2010) dengan meneliti tiga topik terkait sekaligus adalah teknik yang paling efektif untuk meneliti efektivitas, yaitu: (1) optimalisasi tujuan-tujuan, yaitu alih-alih menggunakan tujuan akhir yang diinginkan sebagai dasar pengukuran,

evaluasi harus lebih menekankan pada tujuan yang dapat dicapai; (2) prespektif sistem, pemahaman tentang bagaimana sebuah organisasi terikat dengan lingkungannya dan efektivitas dilihat baik dari segi sistem maupun tujuannya; (3) perilaku manusia dalam organisasi, yaitu perilaku manusia merupakan alat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Efektivitas merupakan suatu tolok ukur pemilihan alternatif yang berbeda untuk digunakan sebagai rekomendasi, terlepas dari pertimbangan efisiensi, berdasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan memberikan dampak yang besar (Jibril, 2017). Sedangkan William N. Dunn dalam Hariyanto (2017) berpendapat bahwa efektivitas merupakan tindakan potensial untuk mencapai hasil yang diinginkan serta selalu diukur dalam bentuk unit produk atau layanan atau nilai moneternya karena sangat terkait dengan rasionalitas teknis. Maka dapat disimpulkan berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa efektivitas adalah skala keberhasilan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Jika banyaknya rencana yang berhasil dicapai maka program tersebut akan semakin efektif. Suatu program bisa dikatakan efektif jika sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010) berpendapat bahwa efektivitas dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi (Struktur dan Teknologi)

Steers menempatkan fokus yang kuat pada struktur dan teknologi saat menjelaskan ciri-ciri organisasi, karena kedua faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas organisasi. Dengan adanya berbagai kemajuan struktural maka produktivitas serta efektivitas organisasi akan meningkat seiring juga dengan perkembangan teknologi dalam fasilitas organisasi.

2. Karakteristik Lingkungan (Lingkungan Ekstern dan Intern)

Dalam karakteristik ini terdapat 2 elemen yang terkait. Elemen yang pertama yaitu lingkungan luar dimana semua lingkungan yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan intern atau iklim organisasi yang terdiri dari banyak kualitas lingkungan kerja.

3. Karakteristik Pekerjaan

Individu dalam lingkungan pekerjaan memiliki perbedaan pandangan tujuan serta kemampuan, hal ini menjadi salah satu pengaruh langsung faktor ketertarikan terhadap organisasi dan pekerjaan di masa depan.

4. Kebijakan Praktik Manajemen

Kebijakan dan manajemen ialah suatu mekanisme yang mencakup berbagai macam kegiatan organisasi. Manajer merupakan peran penting dalam mengarahkan jalannya program-program untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2.1.3 Aspek-Aspek Efektivitas

Menurut Ravianto, berikut merupakan aspek-aspek dalam menjalankan suatu program:

1. Aspek Peraturan/Ketentuan

Regulasi dibuat untuk menjaga agar suatu kegiatan tetap berjalan sesuai dengan strategi. Aturan atau persyaratan harus diikuti agar suatu kegiatan dapat berfungsi dengan baik.

2. Aspek Fungsional/Tugas

Jika orang atau organisasi dapat melaksanakan tugas dan beroperasi sesuai dengan aturan, maka mereka dapat dianggap efektif.

3. Aspek Rencana/Program

Kegiatan dapat dikatakan efektif jika mempunyai rencana yang dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

4. Aspek Tujuan/Kondisi Ideal

Sasaran yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang berorientasi pada hasil dan direncanakan pada proses merupakan keadaan atau tujuan yang ideal.

2.2.1.4 Efektivitas Program

Makmur dalam Nurfauziah dan Nurcahyanto (2020) berpendapat bahwa efektivitas program ialah suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya menunjukkan ketepatan antara apa yang kita harapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas program ialah suatu cara untuk mengukur sampai mana suatu program dapat berjalan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Nurul Najidah, 2013). Serta menurut Kerkpatrick dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017) untuk menentukan efektivitas program bisa menggunakan pendapat dari para peserta diantaranya lewat reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Makmur dalam Nurhasanah dan Randa (2022) menyatakan bahwa efektivitas bisa dilihat dari beberapa segi kriteria, diantaranya yaitu:

1. Ketepatan perhitungan biaya,
Berhubungan dengan akurasi pemanfaatan biaya dimana saat program dilaksanakan tidak adanya kelebihan ataupun kekurangan biaya.
2. Ketepatan berfikir,
Yang nantinya akan menimbulkan keefektifan dan harapannya para tenaga kerja dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal
3. Ketepatan tujuan,
Tujuan yang telah di rencanakan dengan baik dan tepat nantinya akan menunjang keefektifan suatu program pelaksanaan terutama kepada program yang jangka waktunya panjang.
4. Ketepatan sasaran,
Sasaran yang ditetapkan dengan baik secara individu atau secara organisasi akan menentukan kesuksesan aktivitas organisasi.
5. Ketepatan dalam pengukuran
Dalam konteks ini berarti bahwa suatu program harus menggunakan standarisasi untuk beroperasi
6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Kegiatan individu atau organisasi yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan instruksi dengan jelas dan sederhana sehingga mudah dipahami

7. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Ketika suatu kegiatan dilakukan untuk sukses dalam mencapai tujuan karena untuk menetapkan pilihan diperlukan proses yang sangat penting untuk memperoleh efektivitas

2.2.1.5 Pengukuran Efektivitas Program

Untuk mengukur keefektifan suatu program bukan merupakan perkara yang mudah, selain bisa dikaji dari beberapa sudut pandang sesuai dari berbagai peneliti dengan menggunakan konsep yang berbeda. Membandingkan yang sudah direncanakan dengan hasil yang sudah dicapai merupakan salah satu cara melihat suatu tingkat efektivitas. Dalam mengukur efektivitas diperlukannya indikator-indikator efektivitas yang akan menjadi acuan dalam pengukuran efektivitas itu sendiri (Mufliha & Selvi, 2021).

Sutrisno (2010) berpendapat efektivitas dipengaruhi oleh tujuh variabel, yaitu:

1. Struktur
2. Teknologi
3. Lingkungan ekstern
4. Lingkungan intern
5. Keterikatan karyawan pada organisasi
6. Prestasi kerja karyawan
7. Kebijakan manajemen

Terdapat tiga variabel untuk mengukur efektivitas sebuah program menurut Duncan (Steers dalam Maheswary et al., 2022), yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keseluruhan proses pencapaian tujuan. Dalam indikator ini terdapat dua faktor yaitu kurun waktu dan sasaran dari program

2. Integrasi

Integrasi adalah ukuran kapasitas organisasi dalam menjalankan sosialisasi, komunikasi serta pengembangan konsesus

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan penyesuaian bagi organisasi atau program dengan lingkungan sekitar.

Penelitian ini menggunakan teori Subagyo dalam Budiani (2007) dalam hal mengukur efektivitas program, pelaku UMKM yang mengikuti program pemberdayaan dapat dianggap sebagai salah satu perwakilan opini publik. Salah satu teknik untuk mengukur keberhasilan suatu program adalah dengan menilai tingkat kesesuaiannya. Menurut Subagyo pengukuran efektivitas sebuah program dapat menggunakan empat variabel, yaitu:

1. Ketepatan sasaran program

Untuk mengukur seberapa akurat program mencapai tujuannya serta memeriksa apakah program telah sesuai dengan aturan yang relevan. Dalam hal ini, yaitu dengan menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar terciptanya usaha mikro yang berdaya saing serta sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro dengan strategi meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kota Depok melalui pelatihan-pelatihan dalam kegiatan Wirausaha Baru.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi menjadi hal yang penting untuk melihat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya. Sosialisasi program bertujuan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat sasaran program pemberdayaan UMKM agar terciptanya

usaha mikro yang berdaya saing serta sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro dengan strategi meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kota Depok melalui pelatihan-pelatihan dalam kegiatan Wirausaha Baru.

3. Tujuan program

Seberapa jauh ketepatan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, program pemberdayaan bertujuan untuk mempersiapkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta agar terciptanya usaha mikro yang berdaya saing serta sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro dengan strategi meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kota Depok melalui pelatihan-pelatihan dalam kegiatan Wirausaha Baru.

4. Pemantauan program

Pemantauan setelah selesainya pelaksanaan program untuk melihat apakah program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik serta untuk melihat apakah ada kekurangan saat pelaksanaan program. Dalam hal ini, DKUM Kota Depok tetap memantau setelah program selesai serta meninjau apakah ada kekurangan pada program.

2.2.2 Pemberdayaan

2.2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata dasar pemberdayaan adalah daya, daya sendiri berarti “kemampuan” atau “kekuatan” sedangkan pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut “*empowerment*”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan mengacu pada pemberian daya atau kekuatan kepada kelompok lemah yang kurang mampu untuk hidup mandiri, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Hamid, 2018). Hasan dan Azis (2019) berpendapat bahwa dalam proses operasionalisasi telah menunjukkan dua ciri dari konsep pemberdayaan, antara lain:

1. Kecenderungan Primer

Prosedur yang cenderung memberi atau mengalihkan kekuasaan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berdaya. Melalui organisasi dan upaya pembangunan asset, diharapkan dapat mendukung kemandirian masyarakat.

2. Kecenderungan Sekunder

Kecenderungan yang sangat menekankan pada proses merangsang, memotivasi atau menginspirasi masyarakat untuk dapat memilih tindakan mereka melalui proses dialog

Lowe dalam Mulyawan (2016) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses dimana individu mendapatkan otonomi, dorongan, dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang membuat mereka merasa memiliki dan terpenuhi ketika tujuannya tercapai. Bukan hanya sekedar mencakup pada penguatan individu, upaya pemberdayaan juga diterapkan dengan penerapan nilai-nilai budaya modern, seperti ketekunan, penghematan, keterbukaan serta akuntabilitas (Hasan & Azis, 2019). Ulum (2016) menjelaskan bahwa dalam proses pemberdayaan, setiap individu diharapkan dapat belajar dengan bebas mengambil keputusan yang penuh resiko untuk pengembangan dirinya. Konsep pemberdayaan ini melibatkan sikap mengenali dan menghormati keragaman dari setiap individu yang mendapat pembelajaran dari pengalaman pribadi.

2.2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Sebagai salah satu langkah prosedural, inisiatif pemberdayaan masyarakat harus diantisipasi untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dengan membantu masyarakat sasaran pemberdayaan menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mampu mengandalkan diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mardikanto dan Poerwoko dalam Hamid (2018) berpendapat bahwa mengupayakan berbagai perbaikan merupakan bagian dari tujuan pemberdayaan, yaitu:

1. Perbaikan pendidikan
2. Perbaikan aksesibilitas

3. Perbaiki tindakan
4. Perbaiki kelembagaan
5. Perbaiki usaha
6. Perbaiki pendapatan
7. Perbaiki lingkungan
8. Perbaiki kehidupan
9. Perbaiki masyarakat

2.2.2.3 Prinsip Pemberdayaan

Aswas dalam Hamid (2018) berpendapat bahwa khusus pemberdayaan yang menjadikan masyarakat sebagai sasarannya, instansi pelaksana pemberdayaan harus berprinsip sesuai aturan dan konsep untuk menjadi acuan dalam kelancaran pelaksanaannya. Berikut diantaranya prinsip dari pemberdayaan, yaitu:

1. Dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, karena pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, keinginan dan potensi yang unik untuk diberdayakan
2. Kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan potensi, kebutuhan dan masalah masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini dapat diketahui melalui tahap indentifikasi dan sosialisasi pada masyarakat sasaran
3. Masyarakat merupakan tujuan utama pemberdayaan, sehingga harus diposisikan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan serta menjadi landasan bagi semua tujuan, strategi, dan format kegiatan yang telah ditetapkan
4. Nilai budaya serta kearifan lokal harus ditumbuhkan kembali karena dalam pembangunan dibutuhkannya hal itu sebagai modal sosial
5. Diterapkan secara bertahap dan terus menerus, karena pemberdayaan adalah prosedur panjang yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya

6. Menganalisa perbedaan karakter, budaya dan tradisi yang telah lama diterapkan
7. Menganalisa perspektif kehidupan masyarakat, khususnya pada perspektif sosial dan ekonomi
8. Tidak ada separasi terutama pada perempuan
9. Partisipatif sebagai pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan
10. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik bersifat fisik atau non fisik
11. Instansi pemberdayaan memiliki berbagai kemampuan sebagai fasilitator dan mau kerjasama dengan semua pihak

2.2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.3.1 Pengertian dan Konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Hadirnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penunjang perekonomian negara dan kekuatan ekonomi daerah (Astuti & Matondang, 2020). UMKM dapat diklasifikasikan menurut berbagai faktor, seperti jumlah karyawan, volume penjualan atau pendapatan, dan jumlah modal yang dimiliki. Standar kategorisasi setiap kriteria juga dapat bervariasi tergantung pada area atau industri beroperasi. Maka dari itu, untuk memutuskan apakah suatu perusahaan diklasifikasikan sebagai UMKM, ekonom dapat menggabungkan kriteria dan standar yang berbeda untuk memenuhi persyaratan ini (Tambunan, 2021). Di Indonesia pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Berikut merupakan definisinya:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 juga diatur tentang kriteria usaha pada UMKM di Indonesia, berikut kriterianya:

Tabel 2. 2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

No	Jenis Usaha	Kriteria	
		Modal Usaha	Hasil Tahunan
1	Usaha Mikro	Maks. 1 Miliar	Maks. 2 Miliar
2	Usaha Kecil	>1 Miliar – 5 Miliar	>2 Miliar – 15 Miliar
3	Usaha Menengah	>5 Miliar – 10 Miliar	>15 Miliar – 50 Miliar

Sumber: PP No. 7 Tahun 2021, 2023

2.2.3.2 Karakteristik UMKM di Indonesia

Karakteristik UMKM ialah dimana setiap aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha dalam menjalankan bisnisnya terdapat sifat atau kondisi faktual yang melekat. Selain itu, terdapat karakteristik yang berbeda dalam tiap negara, menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia (2015) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicirikan oleh beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
 - a. Tidak tetapnya jenis barang dan dapat berubah sewaktu-waktu
 - b. Tidak tetapnya tempat usaha dan dapat berubah sewaktu-waktu

- c. Belum melakukan administrasi keuangan
 - d. Tidak adanya batas antara keuangan pribadi dan usaha
 - e. Pemilik usaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
 - f. Pendidikan rata-rata rendah
 - g. Beberapa usaha belum ada akses ke perbankan, namun sudah ada sebagian yang akses ke lembaga keuangan non-bank
 - h. Rata-rata belum memiliki izin usaha
2. Usaha Kecil
- a. Pada umumnya jenis barang yang diusahakan sudah tetap
 - b. Pada umumnya lokasi usaha sudah tetap
 - c. Administrasi keuangan sederhana umumnya sudah diterapkan
 - d. Sudah membuat neraca usaha
 - e. Sudah mendapatkan izin usaha
 - f. Pemilik usaha sudah punya pengalaman berwirausaha
 - g. Sebagian sudah memiliki akses ke perbankan untuk keperluan modal
 - h. Manajemen usaha seperti *business planning* belum terlaksana dengan baik
3. Usaha Menengah
- a. Manajemen yang dimiliki sudah baik serta pembagian tugas karyawannya sudah jelas
 - b. Sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang sudah baik
 - c. Sudah melakukan pengelolaan organisasi perburuhan
 - d. Persyaratan legalitas usaha sudah dimiliki
 - e. Memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan
 - f. SDM yang dimiliki sudah terlatih dan terdidik

2.2.3.3 Keuntungan dan Kendala UMKM

UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah. Menurut Harsono (2014) Dalam

memberikan kontribusi dalam pertumbuhan nasional, UMKM memiliki keuntungan yang dihadapi, diantaranya:

1. Lebih berhati-hati dalam menjalankan roda bisnisnya, hal ini dikarenakan akses pendanaan yang rendah dalam mendapatkan sumber modal
2. Ketahanan yang cukup kuat dalam situasi krisis ekonomi, seperti pada krisis ekonomi dunia tahun 1997-1998 sektor UMKM tetap bertahan
3. Bahan baku yang digunakan oleh UMKM biasanya menggunakan bahan baku lokal dimana juga memberi manfaat bagi pemasok bahan baku di dalam negeri
4. Kreativitas sumber daya manusia lokal meningkat
5. Berkontribusi untuk “*barrier to entry*” atau penghalang masuk bagi produk sejenis produk luar negeri
6. Kemampuan untuk menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat tentunya dengan harga yang lebih terjangkau

Sedangkan menurut LPPI dan Bank Indonesia (2015), UMKM juga tidak terlepas dari kendala baik dari internal maupun eksternal. Berikut merupakan kendala yang sering dihadapi UMKM:

a. Internal

1. Modal, banyaknya UMKM di luar sana yang akses ke perbankan masih terbatas.
2. Sumber Daya Manusia (SDM), masih banyaknya SDM di sektor UMKM yang kurang pengetahuan tentang bisnis serta kurang terlatih
3. Hukum, mayoritas pelaku usaha UMKM statusnya masih berbadan hukum perorangan
4. Akutabilitas, sistem manajemen dan administrasi keuangannya masih kurang baik

b. Eksternal

1. Belum kondusifnya iklim usaha

2. Infrastruktur. Rata-rata teknologi yang dipakai UMKM masih tradisional dan sederhana
3. Akses. baik akses pada teknologi, bahan baku serta sepat berubahnya selera masyarakat

2.2.4 Pemberdayaan UMKM

2.2.4.1 Pengertian Pemberdayaan UMKM

Salah satu komponen penting dalam upaya membangun bangsa yang berdaya saing serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah dengan melaksanakan pemberdayaan UMKM. Dalam situasi ini, sektor UMKM harus didorong untuk berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, sumber lapangan kerja baru, dan sarana peningkatan daya saing. Hal ini diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJN 2005-2025), pemberdayaan UMKM adalah sebuah upaya strategis baik di tingkat nasional atau daerah.

Keterlibatan pemerintah harus benar-benar sesuai dan mampu membantu usaha-usaha yang sangat penting bagi terciptanya lapangan kerja saat ini mengingat kompleksitas kesulitan yang dihadapi UMKM. Pemerintah harus berani mengubah pola pemberdayaan yang selama ini diterapkan serta program pemberdayaan harus dibuat dengan terlebih dahulu memahami secara menyeluruh perubahan lingkungan strategis di UMKM (Ramli et al., 2019).

Dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang UMKM, pada Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi suatu usaha yang tangguh dan mandiri.

Selain itu, pemerintah menerapkan sejumlah inisiatif langsung untuk mendukung UMKM agar mereka dapat secara mandiri mengatasi masalah yang mereka hadapi karena pemberdayaan UMKM adalah tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Dalam konteks ini, inisiatif untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi sangat penting dalam menjalankan proses transisi. Terutama dalam memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan di masa depan. Berikut merupakan beberapa strategi pemberdayaan UMKM (Fajar, 2015):

1. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif
2. Meningkatkan peluang pada sumberdaya finansial
3. Meningkatkan akses pasar
4. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM
5. Pemberdayaan usaha skala mikro

2.2.4.2 Konsep Pemberdayaan UMKM di Kota Depok

Program pemberdayaan UMKM di Kota Depok merupakan salah satu usaha dari pemerintah Kota Depok untuk membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Dengan tujuan terciptanya usaha mikro yang berdaya saing, sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro dengan strategi meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kota Depok melalui pelatihan-pelatihan dalam kegiatan Wirausaha Baru.

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2012 Pasal 4 dijelaskan maksud serta tujuan dari pemberdayaan UMKM. Maksud dari pemberdayaan UMKM adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran UMKM secara berkelanjutan. Sedangkan berikut merupakan tujuan pemberdayaan UMKM:

1. Mewujudkan struktur perekonomian di Kota Depok yang seimbang, berkembang dan berkeadilan

2. Menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, professional, maju dan mandiri
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Depok No 18 Tahun 2012 Pasal 3, dijelaskan bahwa pemberdayaan UMKM memiliki asas dan prinsip. Pemberdayaan UMKM berasaskan sebagai berikut:

1. Kekeluargaan
2. Demokrasi ekonomi
3. Kebersamaan
4. Efisiensi berkeadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwawasan lingkungan
7. Kemandirian
8. Keseimbangan Kemajuan
9. Kesatuan ekonomi nasional
10. Kearifan lokal

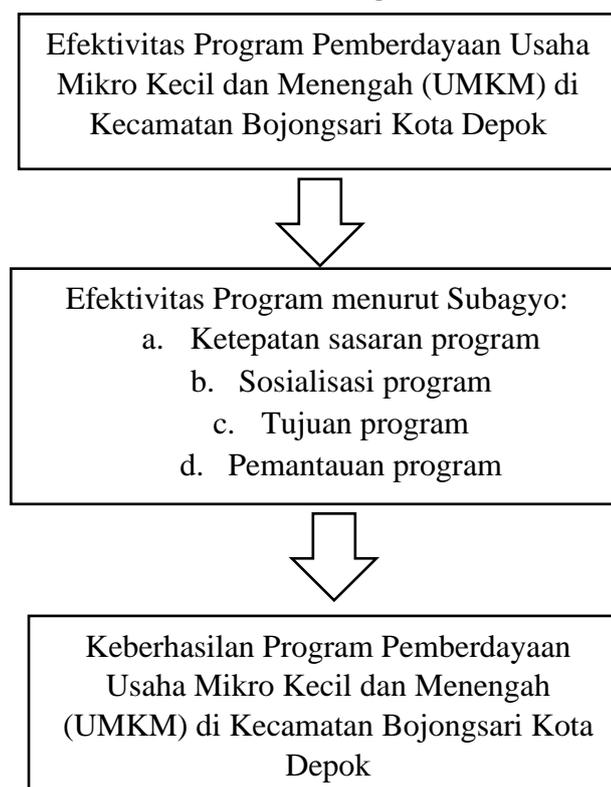
Sedangkan berikut merupakan prinsip-prinsip pemberdayaan:

1. Efektif dan efisien
2. Terpadu
3. Adil
4. Transparan
5. Akuntabel
6. Kemandirian
7. Kompetitif
8. Sadar lingkungan
9. Pengembangan potensi lokal

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan pertama dari masalah yang akan diselidiki, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah teori yang merujuk pada topik penelitian dapat diterapkan dan mampu mendukung realitas lapangan atau tidak. Melihat dari permasalahan dan tinjauan pustaka yang sebelumnya sudah dijelaskan maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui apakah sudah efektif program pemberdayaan UMKM di Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Dalam mengukur efektivitas program pada penelitian ini menggunakan empat variabel yang dinyatakan oleh Subagyo dalam Budiani (2007).

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Pada gambar 2.2 diatas merupakan indikator yang dipaparkan oleh Subagyo berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Untuk mengukur efektivitas program, pelaku UMKM yang mengikuti program pemberdayaan dapat dianggap sebagai perwakilan opini publik. Dimana salah satu teknik untuk mengukur keberhasilan suatu program adalah

dengan menilai tingkat kesesuaiannya. Menurut Subagyo pengukuran efektivitas sebuah program dapat menggunakan empat variabel, yaitu:

1. Ketepatan sasaran program

Untuk mengukur seberapa akurat program mencapai tujuannya serta memeriksa apakah program telah sesuai dengan aturan yang relevan. Dalam hal ini, yaitu dengan menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri merupakan tujuan dari program pemberdayaan.

2. Sosialisasi program

Sosialisasi menjadi hal yang penting untuk melihat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya. Sosialisasi program bertujuan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat sasaran program pemberdayaan sebagai suatu usaha agar UMKM dapat tangguh dan mandiri.

3. Tujuan program

Seberapa jauh ketepatan antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, program pemberdayaan bertujuan untuk mempersiapkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

4. Pemantauan program

Pemantauan setelah selesainya pelaksanaan program untuk melihat apakah program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik serta untuk melihat apakah ada kekurangan saat pelaksanaan program. Dalam hal ini, DKUM Kota Depok tetap memantau setelah program selesai serta meninjau apakah ada kekurangan pada program.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program oleh Subagyo karena ingin mengetahui apakah program pemberdayaan UMKM sudah efektif dalam upaya membangun lingkungan atau iklim ekonomi yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat.